



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

RENCANA KERJA

(RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, saya sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Mamuju, 01 Agustus 2022

Sekretaris Daerah,



Dr. Muhammad Idris, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19641115 199303 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	47
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	52
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	66
2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	127
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	128
3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	128
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	132
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	132
BAB V. PENUTUP	183
5.1 Kaidah Pelaksanaan	183
5.2 Penutup.....	183
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Belanja Daerah di Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.....	6
Tabel T-C29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022(tahun berjalan)	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ...	49
Tabel T-C31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	67
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.....	130
Tabel T-C33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat.....	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- b. Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
- d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
- e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan



dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA–OPD, karena RENJA- OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 kedalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah Sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal



RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 (tiga) Asisten yang menaungi 6 (enam) biro yaitu 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro Organisasi dan Biro Umum.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilakukan dengan melihat capaian program dan kegiatan serta realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Belanja Daerah di Sekretariat Daerah
 Triwulan IV Tahun Anggaran 2021

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	251.544.638.377	241.056.756.333	10.487.882.044	95.83
2	Biro Hukum	2.350.657.478	2.320.800.394	29.857.084	98.73
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	1.503.047.778	1.410.484.938	92.562.840	93.84
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.710.128.060	3.462.332.150	247.795.910	93.32
5	Biro Organisasi	2.484.230.853	2.370.779.394	113.451.459,-	95,43
6	Biro Umum	98.001.142.426	96.630.937.452	1.370.204.974	98,60

Dari enam biro tersebut jika diakumulasi maka besaran pagu anggaran Sekretariat Daerah adalah 359.593.844.972 dengan realisasi sebesar 347.252.090.661 dan menyisakan anggaran 12.228.302.852 sehingga persentase capaian kinerja anggaran sebesar 96,57 %. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 berjumlah 10 Program dan 30 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 masing-masing biro dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2) :

Tabel T-C29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022(tahun berjalan) Provinsi Sulawesi Barat

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	01	SEKRETARIAT DAERAH									
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	76,2	NA	80	67,26	84,075	70	#VALUE!	#VALUE!
1	01	01	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	NA	3	3	100	NA	#VALUE!	#VALUE!
1	01	02	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	60,00	NA	100	82	82	52	#VALUE!	#VALUE!
1	01	03	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	98,23	NA	100	97,42	97,42	97	#VALUE!	#VALUE!



					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	NA	24	24	100	22,4	#VALUE!	#VALUE!	
		1	0 1	0 2		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,00	NA	20	20	100	15,8	#VALUE!	#VALUE!	
		1	0 1	0 2	01	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9,50	NA	12	12	100	9,2	#VALUE!	#VALUE!	
		1	0 1	0 2	02	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,50	NA	8	8	100	5,8	#VALUE!	#VALUE!	
		1	0 1	0 2	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	0	6	3	50	8	11	3,67
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	1	9	900	5	14	14	
		1	0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	1	9	900	5	14	14	
		1	0 1	0 3	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	1	15	1500	10	25	25
		1	0 1	0 3	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	1	10	1000	10	20	20



		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	0	3	1	33,33	4	5	0,83
		1	0 1	0 3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	1	1	100,00	1	2	2
		1	0 1	0 3	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	0			#DIV/0!		0	0
		1	0 1	0 3	02		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	0			#DIV/0!		0	0
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	1	1	100	1	2	2
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	0	4	2	50	4	6	1,00
		1	0 1	0 3	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100			#DIV/0!		100	1
		1	0 1	0 3	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	0	54	1	1,85	84	85	42,5



		1	0 1	0 3	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100,00
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100,00
		1	0 1	0 3	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	15	0	0	50	50	16,67
		1	0 1	0 3	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	8	0	100	35	35	100	135	16,88
		1	0 1	0 3	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100			#DIV/0!		100	1
		1	0 1	0 3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	0	2209	1614	73,06	2	1616	808
		1	0 1	0 3	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	2	2	100	4	6	3
		1	0 1	0 3	02	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	0	40	40	100	40	80	40
		1	0 1	0 3	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	0	70	98	140	164	262	1,54
		1	0 1	0 3		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
		1	0 1	0 3	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100			#DIV/0!		100	1



		1	0 1	0 3	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	0	2	0	0	5	5	1,67
		1	0 1	0 3	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
		1	0 1	0 3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	3	5	166,67	10	15	5,00
		1	0 1	0 3	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	3	2	66,67	10	12	4,00
		1	0 1	0 3	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100			#DIV/0!		100	1
		1	0 1	0 3	03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	0		0	#DIV/0!	0	0	0
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100			#DIV/0!		100	1
		1	0 1	0 3	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	0	19	10	52,63	21	31	1,48
		1	0 1	0 3	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0



		1	0 1	0 3	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	1	2	200	3	5	1,67
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	2	2	100	2	4	0,8
		1	0 1	0 3	01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	100			#DIV/0!		100	1
		1	0 1	0 3	02	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan	8	0	81	58	71,60	232	290	107,75
		1	0 1	0 3	03	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2	0	3	0	0	121	121	60,5
		1	0 1	0 3		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	0	3	2	66,67	18	20	10
		1	0 1	0 3	01	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4	0	75	56	74,67	93	149	37,25
		1	0 1	0 3	02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah	7	0	19	9	47,36		9	1,28
		1	0 1	0 3	03	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	0	12	7	58,33	82	89	44,5
		1	0 1	0 3		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	0	2	0	0	3	3	1,5
		1	0 1	0 3	01	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	0	5	2	40	139	141	47,00
		1	0 1	0 3	02	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah	5	0	5	2	40,00		2	0,4



		1	0	0	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	3	0	3	2	66,67	12	14	4,67
		1	0	0		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	0	1	0	0	3	3	3
		1	0	0	01	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	0	1	0	0	5	5	5
		1	0	0	02	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	0	200	2
		1	0	0	03	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	100	100	100	100	100		200	2
		1	0	0		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1000	0	0	5	#DIV/0!	1476	1481	1,48
		1	0	0	01	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10	0	0	3	#DIV/0!	667	670	67
		1	0	0	02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar	3	0	0	7	#DIV/0!		7	2,33
		1	0	0	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	0	0	6	#DIV/0!	7	13	13
		1	0	0		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	0	0	1	#DIV/0!	7	8	8
		1	0	0	01	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	0	0	0	#DIV/0!	7	7	7



		1	0 1	0 3	02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100	100	100	100	100		200	2
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	0	0	1	#DIV/0!	11	12	12
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	0	0	1	#DIV/0!	12	13	13
		1	0 1	0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	0	0	0	#DIV/0!	9	9	9



Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	60,10	63	66,45	105,48	75	201,55	50,39
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	N/A	40	44	110	80	80	20
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	97,11	100	98,73	98,73	98,85	294,69	73,67
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	20	24	23,59	98,29	24	68	2,70
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	18	19	18,13	95,42	19	55	2,88
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	7	9	7,94	88,22	8	23	2,55
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	3	4	3,92	98,00	4	11	2,43



4	0	0	1	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0	0	1	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0	0	1	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	3,00
4	0	0	1	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	98,85	97,11	100	98,73	98,73	100	295,84	2,99
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	24,27	25	24,68	98,72	25,00	73,95	0,74



4	0 1	0 1	1	0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	100	3	9	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100,00	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00



4	0 1	0 1	1	0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	69	0	0	0	1	70	0,95
4	0 1	0 1	1	0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	0	0	0	1	1	1,00



4	0	0	1	0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0	1	1	0,25
4	0	0	1	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	0	0	0	0	1	1	0,20
4	0	0	1	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	1,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	0	0	0	0	1	1	0,33
4	0	0	1	0	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	10	10	100	10	20	20,00
4	0	0	1	0	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	3	3	100	2	5	2,50
4	0	0	1	0	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	18	18	100	15	33	33,00
4	0	0	1	0	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	50	50	50	100	1	101	1,35
4	0	0	1	0	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0	11	11	5,50
4	0	0	1	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	3	3



4	0	0	1	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	11	11	100	11	33	3,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	13	13	100	13,00	39	3,00
4	0	0	1	0	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	0	6	6	100	10	16	3,20
4	0	0	1	0	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	0	6	6	100	11	17	2,83
0	0	0				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	100	100	118,5	118,5	100	318,5	3,19
0	0	0	1	0		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100	100	100	123	123	100	323	3,23
0	0	0	1	0	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	65	35	47	134,29	35	147	3,68



04	01	05	1	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	543	500	504	100,80	500	1547	2,98
04	01	05	1	01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	608	570	709	124,39	709	2026	3,38
04	01	05	1	01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	236	120	257	214,17	135	628	4,45
04	01	05	1	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	100	100	114	114	100	314	3,14
04	01	05	1	02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3	2	1	2	200	1	5	1,67
04	01	05	1	02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	6	6	6	100	6	18	9,00

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	UNSUBSISTEM PEMERINTAHAN										
4	01	SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	62	53,83	56	58,87	105,13	59,85	59,85	96,53



							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65	N/A	50	52	104,00	52	52	80,00		
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	100	100	80,32	80,32	94	94	98,95		
4	0	0	1	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	15	17	20,61	121,24	22	22	100,00		
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	15	17	14,38	84,59	22	22	100,00		
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80	7	9	8,79	97,67	9,4	9,4	95,92		
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,10	5	7	4,09	58,43	6,5	6,5	91,55		
4	0	0	1	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	4	4	100	6	6	300,00		
4	0	0	1	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	—	0	0	0	0	0	0,00		



4	0	0	1	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1	4	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	2	2	2	100	30	30	1500,00	
4	0	0	1	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	—	0	0	0	0	0	0	0,00
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	—	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
4	0	0	1	0	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	66	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	70	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	11	2	2	100	4	13	650,00	
4	0	0	1	0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	4	4	100	1	1	100,00	
4	0	0	1	0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	—	18	18	100	1	1	#DIV/0!	
4	0	0	1	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	650	20	20	100	1	1	100,00	
4	0	0	1	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	33000	100	100	100	1	1	50,00	
4	0	0	1	0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
4	0	0	1	0	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40	20	20	100	1	1	100,00	
4	0	0	1	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	56	30	30	100	120	120	400,00	
4	0	0	1	0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00	



4	0	0	1	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	—	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	19	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	—	25	25	100	13	13	216,67	
4	0	0	1	0	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	—	0	0	0	0	0	0,00	
4	0	0	1	0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	—	0	0	0	10	10	250,00	
4	0	0	1	0	01 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	7	15	15	100	0	0	0,00	
4	0	0	1	0	01 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	—	8	8	100	0	0	0,00	
4	0	0				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	15,00	100	96,88	96,88	100	100	111,11	
4	0	0	1	0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	18,0	100	93,75	93,75	8	8	8,89	



4	0	0	1	0	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12	12	12	12	100	4	4	33,33
4	0	0	1	0	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6	6	4	3	75,00	4	4	66,67
4	0	0	1	0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	—	0	0	0	4	4	4,00
4	0	0	1	0	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10	—	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10	—	0	0	0	4	4	40,00
4	0	0	1	0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	12	100	100	100	17	17	17,00
4	0	0	1	0	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	8	12	17	12	70,59	12	12	150,00
4	0	0	1	0	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	12	—	5	4	80,00	4	4	33,33



4	0	0	1	0	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12	—	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	10	—	5	5	100	1	1	10,00	
4	0	0	1	0	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	12	—	0	0	0	0	0	0,00	
4	0	0				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	39	100	83,82	83,82	100	100	100,00	
4	0	0	1	0		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	—	100	67,65	100	100	100	100,00	
4	0	0	1	0	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12	—	0	0	0	4	4	33,33	
4	0	0	1	0	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12	—	17	6	35,29	4	4	33,33	
4	0	0	1	0	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13	—	17	17	100	4	4	30,77	
4	0	0	1	0		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	39	100	100	100	100	100	100,00	



4	0	0	1	0	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	13	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	13	2	2	100	4	4	30,77
4	0	0	1	0	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	12	13	0	0	0	1	1	8,33

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	-	-	-	50	50	0,91
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	40	30	75	50	80	1,33



							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	94,50	0	100	93,32	93,32	100,00	193,32	2,05
4	0	0	1	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22	0	-	-	-	21	21	0,95
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22	0	-	-	-	21	21	0,95
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50	0	-	-	-	9	9	0,95
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6,50	0	-	-	-	6	6	0,92
4	0	0	1	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	4	4	100	4	8	4,00
4	0	0	1	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	4	4	100	4	8	4,00
4	0	0	1	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	4	4	100	4	8	2,00
4	0	0	1	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,00	0	100	93,32	93,32	100	193,32	2,01
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	100	100	100	100,00	200	2,00
4	0	0	1	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	1	1	100	1	2	2,00
4	0	0	1	0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	0	2	2	100	2	4	2,00
4	0	0	1	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	100	96,67	96,67	100	196,67	1,97
4	0	0	1	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	0	30	30	100	30	60	2,00
4	0	0	1	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	0	10	10	100	10	20	2,00
4	0	0	1	0	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	0	40	40	100	40	80	2,00
4	0	0	1	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	0	40	36	90	40	76	1,90
4	0	0	1	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	0	0	0	100	100	1,00
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	0	0	0	0	15	15	1,00



4	0	0	1	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	100	100	100	100	200	2,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	100	100	100	100	100	25
4	0	0	1	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	100	100	100	100	200	2,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	0	7	7	100	7,00	14,00	1,56
0	0	0				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	73,03	0	100	69,51	69,51	100	169,51	2,32
0	0	0	1	0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	0	100	100	100	100	200	2,00
0	0	0	1	0	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	0	100	100	100,00	100	200	100,00
0	0	0	1	0	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	100	100	100,00	100	200	50,00



04	01	07	11	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	4	4	100,00	4	8	2,00
04	01	07	12	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	0	100	100	100,00	100	200	2,00
04	01	07	12	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	0	100	100	100,00	100	200,00	50,00
04	01	07	12	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	100	100	100,00	100	200	50,00
04	01	07	12	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	100	100	100,00	100	200	50,00
04	01	07	13	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	0	100	64,52	64,52	100	164,52	1,65
04	01	07	13	03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	0	30	30	100	30	60	2,00
04	01	07	13	03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	0	80	40	50	80	120	40,00
04	01	07	13	03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	0	200	130	65	200	330	110,00

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Organisasi



		Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		1				Unsur Pendukung Usuran Pemerintahan									
		1	0	1		Sekretariat Daerah									
		1	0	0	0	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	86 Poin	75,68 Poin	80 Poin	79,95 Poin	100%	83 Poin	238,63	277,00%
							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	60 Poin	-	45 Poin	37 Poin	82%	55 Poin	92 Poin	153%
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97%	93%	98%	97%	99%	97%	287%	296%
		1	0	0	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28 Poin	25,34 Poin	27 Poin	26,34 Poin	98%	25 Poin	76,68 Poin	274%
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	22 Poin	17,48 Poin	20 Poin	18,75 Poin	94%	25 Poin	61,23 Poin	278%
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	14,50 Poin	12,41 poin	14 Poin	13,41 Poin	96%	14 Poin	39,82 Poin	275%
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	14 Poin	4,71 Poin	6 Poin	5,71 Poin	95%	16 Poin	26,42 Poin	189%



		1	0	0	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		1	0	0	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		1	0	0	04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		1	0	0	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		1	0	0	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		1	0	0		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mmimal B+	33,00%	33%	33%	33%	100%	33%	99%	33%
							Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	100%	36%	60%	50%	83%	83,33%	169,33%	169%
		1	0	0	01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	80%	60%	70%	65%	93%	75%	200%	250%
							Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37	-	28,1-37	28,1-37	100%	28.1-37	65,1	200%
		1	0	0	02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	50%	-	30%	10%	33%	40%	50%	100%
							Nilai SAKIP Pemprov.	70 Poin	63,14 Poin	70,00 Poin	68,00 Poin	97%	70 Poin	201,14 Poin	287%



Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	101,6	N/A	24	17,1	71,25%	24,6	41,7	41,04%
1	01		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	63,5	N/A	20	19,06	95,30%	20,5	39,56	62,30%
1	01	01	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	37,8	N/A	12	10,41	86,75%	12,3	22,71	60,08%
1	01	02	Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	25,7	N/A	8	5,25	65,63%	8,2	13,45	52,33%
1	01	03	Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	50,8	N/A	16	13	81,25%	16,4	29,4	57,87%
1	01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	6	6	100,00%	7	19	67,86%



		1	0	0	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
		1	0	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
		1	0	0	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
		1	0	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	8	6	2	2	100,00%	2	10	125,00%
		1	0	0	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	0	6	4	66,67%	7	11	39,29%
		1	0	0	03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	400	0	95	100	100,00%	100	200	50,00%
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	400	0	90	100	100,00%	100	200	50,00%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13440	300	300	279	93,00%	3360	3939	29,31%
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	0	100	100	100,00%	3	103	858,33%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	9950	0	12	12	100,00%	2400	2412	24,24%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	4	12	12	12	100,00%	1	25	625,00%



						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	8	1	1	1	100,00%	2	4	50,00%
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	0	100	100	100,00%	5	105	525,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	64	6	16	16	100,00%	16	38	59,38%
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	98,96	98,96%	100	198,96	49,74%
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	120	1	30	30	100,00%	30	61	50,83%
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	4	4	100,00%	4	8	50,00%
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	0	0	0,00%	4	4	25,00%
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	24	0	3	3	100,00%	6	9	37,50%
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	288	0	12	12	100,00%	72	84	29,17%
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	8	0	12	12	100,00%	2	14	175,00%
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	40	28	1	1	100,00%	1	30	75,00%



						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4	0	0	0	0,00%	1	1	25,00%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,34	99,34%	100	199,34	49,84%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31	21	575	575	100,00%	7	603	1945,16%
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40	70	1	1	100,00%	10	81	202,50%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28	0	75	72	96,00%	7	79	282,14%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	0				10	10	25,00%
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	19	100	100	100,00%	50	169	84,50%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,78	99,78%	100	199,78	49,95%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	0	25	25	100,00%	4	29	181,25%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	0	20	11	55,00%	4	15	93,75%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	36	15	15	100,00%	2	53	662,50%



						Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	8	15	15	15	100,00%	2	32	400,00%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	0	16	16	100,00%	12	28	58,33%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	320	750	596	79,47%	12	928	1933,33%
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	20	1	1	100,00%	1	22	550,00%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	400	0	95	95	100,00%	100	195	48,75%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18	5	5	5	100,00%	3	13	72,22%
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	0				5	5	19,23%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	4	2	2	100,00%	10	16	33,33%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	280	10	30	30	100,00%	70	110	39,29%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	100	96,22%	100	200	50,00%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	4865	100	100	100,00%	12	4977	10368,75 %
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	4	4	4	100,00%	12	20	41,67%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	98,49	98,49%	100	198,49	49,62%



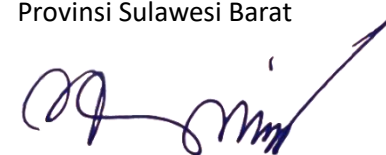
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	17	20	20	100,00%	20	57	71,25%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480	164	150	150	100,00%	120	434	90,42%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	680	35	70	70	100,00%	170	275	40,44%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	4	12	12	100,00%	12	28	58,33%
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	0	5	5	100,00%	6	11	45,83%
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%
					Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20	0	40	40	100,00%	5	45	225,00%
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15	0	40	40	100,00%	5	45	300,00%
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	40	0	800	774	96,75%	10	784	1960,00%



						Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	400	0	100	97,31	97,31%	100	197,31	49,33%
						Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	845	0	2000	1448	72,40%	200	1648	195,03%
						Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3900	1500	1200	1070	89,17%	900	3470	88,97%
						Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6200	0	2500	2500	100,00%	1400	3900	62,90%
						Fasilitas Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitas Keprotokolan (Persen)	400	0	100	99,02	99,02%	100	0	0,00%
						Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4600	0	1800	1677	93,17%	1000	2677	58,20%
						Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	43	100	100	100,00%	12	155	322,92%
						Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	4070	0	1800	1800	100,00%	900	2700	66,34%

Mamuju, 01 Agustus 2022

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat



Dr. Muhammad Idris, M.Si
Nip : 196411151993031001



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai pasca bencana gempa bumi.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :



1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan masyarakat.

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2. Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan di bidang Keagamaan			100	100	100	100	100	100	100	100	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Hukum

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan			100	100	100	100	123	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum			100	100	100	100	114	100	100	100	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan



NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan			100	100	90	90	96,88	100	90	90	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan			100	100	100	100	33,71	100	100	100	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa			100	100	100	100	100,00	100	100	100	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			70,90	73,03	73,03	75,95	70,90	72,00	73,03	75,95	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Organisasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
	Indeks Pelayanan Publik			-B	B	B+	B+	-B	B	B+	B+	
	Indeks Kematangan Organisasi			28.1-37	28.1-37	28.1-37	37.1-46	33,71	28.1-37	37.1-46	37.1-46	



Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Umum

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kepuasan Layanan			N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	



2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Program pemerintah pusat dalam upaya pembentukan IKN menjadi semangat baru bagi Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dalam mendukung setiap proses pembangunannya. Terlebih jika Ibukota Negara terbentuk sesuai dengan rencana yang berlokasi di Kalimantan Timur, maka secara geografis kedekatan IKN dengan Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan manfaat yang besar bagi percepatan pembangunan kedua Provinsi. Tentunya Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Timur dapat membangun program kerja sama antar daerah baik dari segi pembangunan ekonomi, maupun aspek pembangunan lainnya. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran yang cukup bagus dalam upaya fasilitasi kerjasama sama daerah serta badan usaha baik yang bersifat makro maupun mikro, erumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan BUMD dan BLUD dalam konteks kekinian serta fasilitasi perumusan kebijakan ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai banyak potensi yang dapat dipromosikan menjadi produk yang menarik para investor maupun wisatawan mancanegara. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih serius dalam mengelola atau menata daerah kewilayahan beserta sumber daya yang ada sehingga menjadi nilai jual yang dapat dibanggakan daerah. Selain dengan meningkatkan potensi sumber daya daerah dalam menopang pembangunan IKN, dibutuhkan pula pembenahan dan peningkatan pengelolaan mutu pelayanan. Kedekatan IKN dengan Provinsi Sulawesi Barat tentunya akan meningkatkan aktivitas pembangunan di segala bidang dan meningkatkan relasi yang tinggi. Relasi yang terbangun ini akan berefek pada intensitas pemanfaatan moda transportasi baik itu udara, laut maupun transportasi darat yang akan digunakan dalam berbagai pertemuan.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai unsur pendukung yang memiliki peran penting dibawah kepemimpinan sekretaris daerah yang dilimpahkan pada biro-biro. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu kedepan.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2023 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum Optimalnya Penyusunan dan Penilaian LPPD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas amanat yang diterima melalui

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga poin LPPD menjadi rapor yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan LPPD oleh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun LPPD Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan LPPD oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Sehingga untuk meningkatkan poin LPPD, upaya koordinasi untuk memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring bisa berjalan dengan baik hasil dimaksimalkan.

Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan, pembinaan dan monitoring; maupun pemahaman aparatur di masing-masing instansi yang menyusun LPPD sangat penting untuk diperhatikan . Sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan dalam menyusun LPPD ini berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan poin LPPD.

2. Belum Optimalnya Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang *urgent* untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamaju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upayaantisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

3. Belum Optimalnya fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD.

Isu strategi terkait fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD harus menjadi salah satu isu utama pada 2024 sebab Komisi Pemilihan Umum

menetapkan Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Dalam proses fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD ini, koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan proses pemilihan hingga pengambilan sumpah jabatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini termasuk pula seluruh kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk penetapan pejabat yang ditunjuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka segala sumber daya yang dibutuhkan harus sudah siap saat pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan.

4. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota. (2)

Dalam upaya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat dihindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Dalam Negeri serta masing-masing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

5. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah (3).

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindak lanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar

Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan.

6. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

Fasilitasi terkait bidang keagamaan ini banyak yang menjadi isu penting sebab menjadi salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan Hibah Rumah Ibadah yang selalu dilakukan setiap tahun menjadi salah satu hal yang banyak dimanfaatkan oleh umat beragama yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Bantuan rumah ibadah ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah ibadah yang akan dan telah menerima bantuan.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok masih memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQ pun perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQ saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

7. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. (4)

Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

Hal ini tercermin dalam peran pemerintah Provinsi terkait dana BOS yang belum diatur secara jelas sehingga dalam panyaluran dana BOS bisa terjadi melibatkan komunikasi langsung antara KPPN dengan pihak sekolah di kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibuatkannya aturan hukum yang secara jelas menetapkan SOP dan peran masing-masing instansi/perangkat daerah dalam penyaluran dan pengawasan dana BOS ini.

Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut perlu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Belum optimalnya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota.

Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan kabupaten oleh Gubernur, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan sangat urgen. Disatu sisi produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun disisi yang lain pemerintah provinsi juga melakukan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD

Tujuan utama pembentukan/pendirian BUMD dan BLUD merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah di sektor bisnis. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini BUMD dan BLUD belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD di Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan karena:

Khusus untuk BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi terkendala dengan belum diserahkannya dana PI (Participating Interest) oleh kontraktor pengelola migas pada blok Sebuku;

Khusus untuk BUMD Perseroda Sulawesi Barat Malaqbi, pengelolaan perseroda tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap Direksi pengelola Perusda;

Khusus untuk BLUD penerimaan pendapatan yang diterima pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai dengan yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD. Hal ini dikarenakan jumlah pasien yang diproyeksikan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Belum optimalnya Pengendalian dan perumusan kebijakan perekonomian daerah terkait inflasi daerah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan

sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas (kelompok kerja nasional) TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Keanggotaan TPID terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Diharapkan, TPID ke depan tidak hanya menysasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.

3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha dan instansi terkait kebijakan akses keuangan daerah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya

dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan, diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat.

4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. (1)

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang dapat terintegrasi langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realisasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapat mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselenggarakan.

Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula dengan kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

2. Belum optimalnya kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa.

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan jasa memiliki 11 orang dari kebutuhan 20 orang pada formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (kurang dari target 60%). Selain itu juga belum memiliki personil perencana, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap Perangkat Daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra. Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan.

3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek lain seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi kordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Pertama, pemenuhan SDM pengelolaan LPSE. Dibutuhkan ketersediaan SDM yang professional untuk mengelola bagian-bagian seperti admin, pemeliharaan perangkat. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas.

Kedua, pemenuhan sarana-prasarana. LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan memerlukan adanya sarana yang memadai. Mulai dari backup keamanan sampai pada fasilitas administrasi.

Ketiga, adalah pengelolaan informasi yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan bila ada kordinasi yang baik dengan pihak lain, terutama yang membidani keuangan dan perencanaan. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE.

e. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. (2)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (3)

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelayanan publik. (4)

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Belum optimalnya penataan dan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah. (1)

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

- f. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan

Pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggaan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi biro umum yakni kurangnya pengendalian dan keterlambatan penyediaan logistik pada rumah tangga pimpinan dan kurangnya pengendalian, pengawasan serta pemeliharaan kendaraan dan bangunan. Hal tersebut menjadi faktor lemahnya Pelayanan Kerumahtanggaan dan pelayanan umum. Padahal Salah Satu Sentral Pelayanan Pimpinan Berada Pada Biro Umum Oleh Karenanya Hal tersebut Harus Mendapatkan Penguatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Pemahaman terkait pelaksanaan tugas pramusaji dan supir pimpinan / operasional juga masih perlu di tingkatkan mengingat hal tersebut merupakan kegiatan yang melekat dan merupakan pelayanan langsung.

2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat.

Sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Governance* di daerah. Bagian bagian lain yang sama pentingnya adalah ménata

sistem perencanaan dan penganggaran, sistem penatausahaan, sistem akuntansi dan pelaporan. Tuntutan pembaharuan dan akuntabilitas sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mendasarkan konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas public (*Public accountability*).

3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat.

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodefikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodefikas barang milik daerah juga msih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

4. Belum optimalnya pelayanan pimpinan.

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan, penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

5. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan
Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegiatan pimpinan ditentukan pengaturan acara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggaraan kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pimpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif. Selain itu belum adanya ASN yang berertifikasi dan memenuhi standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD merupakan susunan awal dari program kerja dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan yang telah direview dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pada tahapan RKPD.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indicator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Barat

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	72,60	645.767.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	72,60	388.032.000	
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	599.965.000			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	129.135.000	
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	60,00	866.459.000			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	60,00	485.304.300	
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan	98,99	1.420.854.000			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan	98,99	190.818.700	



			Kesejahteraan Rakyat					Kesejahteraan Rakyat			
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	291.894.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	170.562.000	
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,00	233.400.000			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,00	143.290.000	
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	55.400.000			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	35.430.000	
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,00	53.280.000			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,00	34.230.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	233.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	143.290.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	21.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.430.000	



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	25.432.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	7.980.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.430.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.430.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6.432.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6.432.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	55.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	35.430.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	53.280.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	34.230.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	11.793.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		4.520.000	



			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	11.793.000			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		4.520.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	7.443.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	3.320.000	
II I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	599.965.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		129.135.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	75.640.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	41.890.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1	4.325.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1	6.545.000	



			Administrasi Kepegawaian					Administrasi Kepegawaian			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	198.900.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	43.200.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	295.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	37.500.000	
I V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	866.459.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		485.304.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	81.230.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	55.315.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	45.700.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	25.700.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	95.539.000	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	45.358.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	590.540.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58	353.501.100	



	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	53.450.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	5.430.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	1.111.320.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		59.058.700	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	532.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	31.572.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	65.430.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	223.460.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	16.833.700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	290.430.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10.653.000	



V I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	4.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1.675.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	4.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	1.675.000
V II	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	305.184.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		130.085.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	155.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	93.150.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	57.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	45.544.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	25.465.000



			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	46.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	11.470.000	
B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	3.315.821.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1.800.000.000	
I	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan	8	1.310.430.000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan		1.100.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Polewali Mandar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2	424.000.000	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Polewali Mandar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2	99.805.700	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Majene	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	330.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Majene	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1	850.000.000	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4	556.430.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	150.194.300	
II	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah	7	1.078.160.000	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah		450.000.000	



	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	332.900.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	149.999.800
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	290.900.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	149.999.800
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Majene	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	454.360.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Majene	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2	150.000.400
II I	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah	5	927.231.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah		250.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	3	403.210.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2	250.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	223.111.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	0	-
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Mamuju	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	300.910.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Mamuju	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	0	-
C.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	32.546.601.000	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		33.769.177.900
I	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	100	30.830.760.000	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama		10.200.000.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Se Prov. Sulbar	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1000	25.430.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Se Prov. Sulbar	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	43	10.100.000.000



	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Mamuju	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10	5.400.760.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Mamuju	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	100.000.000	
II	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar	3	780.411.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar		23.419.177.900	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	345.670.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	23.319.177.900	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	234.530.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	50.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	200.211.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	50.000.000	
II I	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100	935.430.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		150.000.000	



Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	350.900.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	300.210.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	284.320.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	0	-



Nama Perangkat Daerah : Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	80	77.599.260,33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	80	77.599.260,33	
		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	522.797.781,00		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	453.500.000,00	
		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	90	2.097.593.096,43		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	90	1.360.000.000,00	
		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	98,85	70.000.000,00		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	98,85	70.000.000,00	
		Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	25	17.599.260,33		Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	25	17.599.260,33	
		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19	40.000.000,00		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19	40.000.000,00	
		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9	10.000.000,00		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9	10.000.000,00	
		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	4,50	10.000.000,00		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	4,50	10.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.599.260,33		Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.599.260,33	
		Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2	10.000.000,00	



			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.000.000,00			Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.000.000,00
		Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	98,85	30.000.000,00			Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	98,85	30.000.000,00
		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	40.000.000,00			Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	40.000.000,00
		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	10.000.000,00			Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	10.000.000,00
		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	10.000.000,00			Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	10.000.000,00
		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	10.000.000,00			Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	10.000.000,00
		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000,00			Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000,00



		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100.000.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	40.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	276.799.013,78		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	198.500.000,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	7.430.000,78		Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	7.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	70.540.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	70.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.430.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	15.320.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	15.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	11.430.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	11.500.000,00	
		Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	50.444.000,00		Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	30.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	20.300.000,00		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	95.905.013,00		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	50.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	1.837.593.096,43		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	1.210.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	150.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	150.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	100.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	250.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	150.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	200.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	60.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	150.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	20.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	200.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	200.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	437.593.096,43		Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	500.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	150.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	50.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	150.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	100.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	60.000.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	60.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100.000.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	50.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	100.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	50.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	245.998.767,22		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	255.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	60.998.767,22		Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	70.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	60.000.000,00		Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	60.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	25.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	50.000.000,00		Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	50.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	25.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	25.000.000,00	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	1.007.407.757,73	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	1.495.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	100	597.407.757,73		Mamuju	Persentase Pengelolaan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	100	595.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	120.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	120.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	115.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	115.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	110.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	110.000.000,00	



		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	252.407.757,73		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	250.000.000,00	
		Mamuju	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	100	410.000.000,00		Mamuju	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	100	900.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3	305.000.000,00		Mamuju	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3	550.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	105.000.000,00		Mamuju	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	350.000.000,00	

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	62	Rp 2.767.990.137,76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	64,5	Rp 828.901.250,00	
		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100			Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75		



		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65			Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65		
		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95			Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	132.108.620,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	140.850.000,00	
		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22			Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22		
		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80			Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80		
		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,10			Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,10		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	18.872.660,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	40.600.000,00	



2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2	100.250.000,00	



			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	18.872.660,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	52.843.448,35	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	70.200.000,00	
		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100			Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100		
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	6.290.886,67	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	6.290.886,67	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-	



10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	6.290.886,67	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	6.290.886,67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	6.290.886,67	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	-	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	21.389.015,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	70.200.000,00	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	6.290.886,67	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	72.999.383,60	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	3.000.000,00	



15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	18.249.845,90	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	
16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	18.249.845,90	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	-	
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	18.249.845,90	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	18.249.845,90	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	276.799.013,76	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	69.145.000,00	
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	34.599.876,72	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	34.599.876,72	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47	37.245.000,00	



21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	34.599.876,72	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	-
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	34.599.876,72	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	34.599.876,72	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	34.599.876,72	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	31.900.000,00
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	34.599.876,72	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	34.599.876,72	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan	100	1.775.079.796,94	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan	100	439.320.768,00



			Administrasi Pembangunan					Administrasi Pembangunan			
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	290.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	127.742.468,00	
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	162.513.299,49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	40.000.000,00	
31	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	162.513.299,49	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	10.001.300,00	
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	162.513.299,49	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	
33	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	162.513.299,49	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	25.150.000,00	
34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	236.427.000,00	



35	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	162.513.299,49	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		
36	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	162.513.299,49	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	22.647.192,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	8.885.482,00	
37	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	
38	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	
39	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	8.885.482,00	
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	



41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-
42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	162.513.299,49	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	3.000.000,00
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	162.513.299,49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	272.999.383,62	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	94.500.000,00



44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	84.000.000,00
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-
46	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	21.499.691,81	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-
47	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	21.499.691,81	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	10.500.000,00
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-



2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	604.444.654,64	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	818.098.750,00	
9	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	204.444.654,64	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	298.000.000,00	
50	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12	104.444.654,64	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5	119.000.000,00	
51	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6	100.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	5	179.000.000,00	
10	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	100.000.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	137.000.000,00	
52	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10	30.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4	63.500.000,00	
53	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10	30.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0	-	



54	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4	73.500.000,00
11	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	300.000.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	383.098.750,00
55	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	8	100.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4	102.879.150,00
56	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	4	119.160.050,00
57	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0	-
58	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	10	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4	161.059.550,00



59	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	12	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	0	-
3	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	700.185.430,41	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	353.000.000,00
12	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	400.185.430,41	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	220.000.000,00
60	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12	130.185.430,41	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	0	-
61	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12	130.000.000,00	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	5	140.000.000,00
62	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13	140.000.000,00	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	5	80.000.000,00
13	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Analisis Capaian	100	300.000.000,00	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Analisis Capaian	100	133.000.000,00



			Kinerja Pembangunan Daerah					Kinerja Pembangunan Daerah			
63	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	120.000.000,00	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	0	-	
64	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	110.000.000,00	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	5	133.000.000,00	
65	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	12	70.000.000,00	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	0	-	

Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	55	2.767.990.137,75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	55	999.855.050,00	



		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100			Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100		
		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60			Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60		
		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	94,50			Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	94,50		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22	375.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22	166.060.000,00	
		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22			Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22		
		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50			Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50		



		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6,50			Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6,50		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	75.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	20.310.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	22.800.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9.640.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	19.020.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.500.000,00	



6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	73.690.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.100.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,00	127.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,00	40.980.000,00
		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100			Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20.980.000,00



9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	77.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	20.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	350.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	147.616.000,00
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	250.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	147.616.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	650.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	435.012.150,00



12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	94.000.000,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	17.350.000,00
14	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	150.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	80.060.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	243.602.150,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	715.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	76.866.900,00
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	400.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	30.767.000,00



17	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	125.000.000,00	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10.000.000,00	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	190.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	36.099.900,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	50.990.137,75	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	10.000.000,00	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	50.990.137,75	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	10.000.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	500.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	123.320.000,00	
20	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	250.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	78.080.000,00	



21	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	250.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	45.240.000,00	
2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Mamuju	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	73,03	523.785.141,74	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Mamuju	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	73,03	2.000.144.950,00	
8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	174.595.047,74	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	599.920.950,00	
22	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	58.198.349,74	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	200.516.950,00	
23	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	58.198.349,00	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	190.000.000,00	
24	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	58.198.349,00	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	209.404.000,00	



9	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mamuju	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	174.595.047,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mamuju	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	701.000.000,00
25	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	58.198.349,00	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	144.668.000,00
26	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	58.198.349,00	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	456.260.000,00
27	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	58.198.349,00	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	100.072.000,00
10	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	174.595.047,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	699.224.000,00
28	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	58.198.349,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	229.300.000,00



29	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	58.198.349,00	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	173.374.000,00
30	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	58.198.349,00	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	296.550.000,00

Perangkat Daerah: Biro Organisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	86	72.659.741,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	86	1.196.527.609	
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100	522.797.781,00			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100	-	



			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	60	2.099.872.874,43			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	60	-	
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97	72.659.741,33			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28	10.379.963,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28	316.194.260	sesuai hasil analisi s kebutu han
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	22	41.519.852,00			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	22	-	
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	14,5	10.379.963,00			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	14,5	-	
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	14	10.379.963,00			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	14	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97	31.139.889,33	-	-	-	-	-	tidak sesuai hasil analisi s kebutu han
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Organisasi	100	41.519.852,00	-	-	-	-	-	



	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	100.000.000,00	-	-	-	-	-	tidak sesuai hasil analisis kebutuhan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	276.799.013,78	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	107.534.600	sesuai hasil analisis kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100 %	1.637.593.096,43	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100 %	576.128.719	sesuai hasil analisis kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	62.279.778,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	25.750.000	sesuai hasil analisis kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	66.124.630	sesuai hasil analisis kebutuhan



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulbar	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	245.998.767,22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulbar	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	104.795.400	sesuai hasil analisis kebutuhan
2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	33,00 %	394.298.152,20	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	33,00 %	1.403.472.391	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	100 %	777.163.587,00			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	100 %	-	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Prov. Sulbar	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	80%	116.432.717,40	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Prov. Sulbar	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	80%	574.217.391	sesuai hasil analisis kebutuhan
			Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37	277.865.434,80			Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37	-	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Prov. Sulbar	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	50%	307.865.434,80	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Prov. Sulbar	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	50%	829.255.000	sesuai hasil analisis kebutuhan
			Nilai SAKIP Pemprov.	70 Poin	469.298.152,20			Nilai SAKIP Pemprov.	70 Poin	-	

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Umum



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai SAKIP Lingkup Biro Umum	67,40	87.996.301,66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai SAKIP Lingkup Biro Umum	67,40	596.710.324,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum	100	2.597.758.743,29		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum	100	8.391.420.676,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum	60	10.604.195.642,83		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum	60	19.325.781.884,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum	97,00	28.229.901.377,54		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum	97,00	30.524.559.133,61	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	25	22.996.301,66	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	25	257.386.556,00	
		Mamuju, Simboro dan	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum	21	32.000.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum	21	124.965.652,00	



		Kepulauan, Rangas								
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum	12,5	13.000.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum	12,5	76.421.012,00
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum	15	20.000.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum	15	137.937.104,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	22.996.301,66	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	257.386.556,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	1	9.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	1	35.619.650,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	1	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	1	50.286.506,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	16.508.132,00



			Dokumen DPA-Biro Umum					Dokumen DPA-Biro Umum			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	1	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	1	22.551.364,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	1	13.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	1	76.421.012,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	137.937.104,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum	100	27.979.901.377,54	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum	100	29.836.041.363,61	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum	100	100.000.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum	100	310.937.460,00	



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	27.679.901.377,54	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	28.195.099.763,61	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	105.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	161.550.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	2450	155.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	2450	1.152.969.250,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	1	40.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	1	326.422.350,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	2	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	2	57.790.200,00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	50.000.000,00	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	159.285.360,00	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan , Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	16	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	16	93.861.900,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju, Simboro dan Kepulauan , Rangas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	10.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan , Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	100	516.230.160,69	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	100	6.703.807.557,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan , Rangas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	30	90.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	30	368.963.187,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan , Rangas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	4	200.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	4	2.188.213.550,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan , Rangas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	4	30.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	4	301.201.690,00	



	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	6	51.230.160,69	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	6	391.981.970,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	72	30.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	72	120.098.050,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	2	75.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	2	317.391.690,00
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	40	40.000.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	40	3.015.957.420,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	150.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	377.580.310,00
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	40.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	-
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	60.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	377.580.310,00



Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	30.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	-	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2	20.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum	100	1.383.995.067,88	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum	100	720.629.116,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	424	214.995.067,88	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	324	72.767.800,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	185.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	124.708.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27	150.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27	130.328.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75	125.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75	82.826.376,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	85.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	97.259.000,00	



	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7	134.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	490.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	212.739.940,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	100	6.559.721.427,96	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	100	6.562.524.183,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	920.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	692.494.120,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	270.000.000,00						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	155.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	419.961.315,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2.764.721.427,96	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	4.157.492.937,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17	280.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17	152.464.850,00	



	Fasilitas Kunjungan Tamu	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	900.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	455.599.860,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	633.840.750,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	120.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	50.670.351,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	400.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.139.503.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	200.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	35.503.000,00	
	Pengadaan Mebel	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	40.000.000,00	Pengadaan Mebel	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	60.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	2.104.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.128.244.054,18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.919.947.144,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	265.605.004,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1.700.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	2.054.322.140,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.128.244.054,18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.600.020.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.213.763.675,41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	7.670.791.560,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	1.398.529.980,00



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	400.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	2.091.423.880,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	100.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	946.537.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	513.763.675,41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	3.234.300.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	100	59.066.449.328,99	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	100	20.596.247.663,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.600.000.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.265.143.037,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	300.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	239.619.917,00



	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	100.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	25.523.120,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1.200.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1.000.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	30.466.449.328,99	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	10.653.577.292,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	9.700.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	4.254.670.340,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	6.666.449.328,99	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0	-	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	14.100.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	6.398.906.952,00	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	20.000.000.000,00	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	7.091.034.920,00	



	Penyiapan Materi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12	3.000.000.000,00	Penyiapan Materi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12	183.007.000,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1500	13.000.000.000,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1500	6.491.463.560,00	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	2500	4.000.000.000,00	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	2500	416.564.360,00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100	7.000.000.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100	1.586.492.414,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1800	2.000.000.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1800	116.214.774,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1200	2.000.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1200	523.137.160,00	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1800	3.000.000.000,00	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1800	947.140.480,00	



2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2023 tidak memiliki catatan usulan untuk Sekretariat Daerah pada umumnya dan Biro-biro pada khususnya baik itu dari Masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan ataupun para stakeholder. Dengan demikian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2023 tidak memuat Program ataupun Kegiatan yang berasal dari usulan-usulan tersebut.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tentunya tidak terlepas dari layanan yang masing-masing biro berikan, adapun layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;

- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan.

Jenis kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.



Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Umum

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lampiran I tentang Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Barat

Nama Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (2023)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	76,2	645.767.000	APBD	-	76,2	691.100.000
				Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	100,00	599.965.000	APBD	-	100,00	325.000.000
				Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	60,00	866.459.000	APBD	-	60,00	900.000.000
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	98,23	1.432.647.000	APBD	-	98,23	1.638.000.000
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	23,00	291.894.000	APBD	-	23,00	313.100.000
				Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	17,00	233.400.000	APBD	-	17,00	250.000.000
				Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	9,50	55.400.000	APBD	-	9,50	60.000.000
				Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	6,50	53.280.000	APBD	-	6,50	55.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	3	233.400.000	APBD	-	3	250.000.000



						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mamuju	1	21.200.000	APBD	-	1	22.500.000
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Mamuju	1	25.432.000	APBD	-	1	27.600.000
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Mamuju	1	5.430.000	APBD	-	1	6.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Mamuju	1	6.432.000	APBD	-	1	7.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	6	55.400.000	APBD	-	3	60.000.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	1	53.280.000	APBD	-	1	55.000.000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	11.793.000	APBD	-		13.000.000
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	11.793.000	APBD	-		13.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	1	4.350.000	APBD	-	1	5.000.000



						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	6	7.443.000	APBD	-	2	8.000.000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	599.965.000	APBD	-		325.000.000
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju	2	75.640.000	APBD	-	2	80.000.000
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	1	4.325.000	APBD	-	1	5.000.000
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	1	25.500.000	APBD	-	1	30.000.000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju	3	198.900.000	APBD	-	2	100.000.000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Dalam & Luar Daerah	8	295.600.000	APBD	-	5	110.000.000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	866.459.000	APBD	-		900.000.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju	2	81.230.000	APBD	-	2	90.000.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju	2	45.700.000	APBD	-	2	50.000.000
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Mamuju	2	95.539.000	APBD	-	2	100.000.000



						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Daerah	170	590.540.000	APBD	-	250	600.000.000
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	1	53.450.000	APBD	-	1	60.000.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	1.111.320.000	APBD	-		1.260.000.000
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju	3	532.000.000	APBD	-	3	500.000.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mamuju	4	65.430.000	APBD	-	2	70.000.000
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju	3	223.460.000	APBD	-	3	390.000.000
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju	3	290.430.000	APBD	-	5	300.000.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	4.350.000	APBD	-		5.000.000
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	7	4.350.000	APBD	-	7	5.000.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	305.184.000	APBD	-		360.000.000



						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	21	155.650.000	APBD	-	21	200.000.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mamuju	7	57.430.000	APBD	-	7	60.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju	3	45.544.000	APBD	-	3	50.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju	5	46.560.000	APBD	-	5	50.000.000
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100	3.315.821.000	APBD	-		3.520.000.000
						Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan		8	1.310.430.000	APBD	-		1.300.000.000
						Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Polewali Mandar	2	424.000.000	APBD	-	2	500.000.000
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Majene	2	330.000.000	APBD	-	2	400.000.000
						Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Pasangkayu	4	556.430.000	APBD	-	4	400.000.000
						Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah		7	1.078.160.000	APBD	-		1.200.000.000
						Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Mamuju	2	332.900.000	APBD	-	2	400.000.000
						Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Mamuju	2	290.900.000	APBD	-	2	300.000.000



						Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Majene	3	454.360.000	APBD	-	3	500.000.000
						Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah		5	927.231.000	APBD	-		1.020.000.000
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Mamuju	3	403.210.000	APBD	-	2	450.000.000
						Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Mamuju	1	223.111.000	APBD	-	2	250.000.000
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Mamuju	1	300.910.000	APBD	-	1	320.000.000
						PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		100	32.546.601.000	APBD	-		34.990.000.000
						Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama		100	30.830.760.000	APBD	-		33.000.000.000
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Se Prov. Sulbar	1000	25.430.000.000	APBD	-	1000	27.000.000.000
						Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Mamuju	10	5.400.760.000	APBD	-	7	6.000.000.000
						Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar		3	780.411.000	APBD	-		950.000.000
						Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Mamuju	1	345.670.000	APBD	-	1	400.000.000
						Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Mamuju	1	234.530.000	APBD	-	1	300.000.000



						Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Mamuju	1	200.211.000	APBD	-	1	250.000.000
						Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		100	935.430.000	APBD	-		1.040.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Mamuju	1	350.900.000	APBD	-	1	400.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Mamuju	1	300.210.000	APBD	-	1	340.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Mamuju	1	284.320.000	APBD	-	1	300.000.000

Nama Perangkat Daerah : Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01					SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	Mamuju	80	77.599.260,33	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	80	80.766.192,60	
							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	522.797.781,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100	532.298.577,79	
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	Mamuju	90	2.097.593.096,43	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	92	2.127.151.130,90	
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	Mamuju	98,85	70.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	98,90	70.000.000,00	
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	Mamuju	25	17.599.260,33	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	25	20.766.192,60	
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	Mamuju	19	40.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	20	40.000.000,00	
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	Mamuju	9	10.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana	9,30	10.000.000,00	



											Alokasi Umum			
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	Mamuju	4,50	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,00	10.000.000,00
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	2	17.599.260,33	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	20.766.192,60
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00



4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	2	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	10.000.000,00
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	4	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	10.000.000,00
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	Mamuju	98,85	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98,90	30.000.000,00
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	40.000.000,00
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00



4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00
4	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	3	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	10.000.000,00
4	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	100.000.000,00
4	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	1	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	25.000.000,00
4	01	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	1	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	25.000.000,00



4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	1	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	25.000.000,00
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	1	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	25.000.000,00
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	276.799.013,78	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	281.021.590,13
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	2	7.430.000,78	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	7.554.000,13
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju	74	70.540.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	74	71.234.100,00
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	1	5.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	5.500.000,00
4	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	1	15.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	15.700.000,00



4	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	1	11.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	12.000.000,00
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju	1	50.444.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	51.233.000,00
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	4	20.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	21.310.000,00
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	5	95.905.013,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5	96.490.490,00
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	1.837.593.096,43	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	1.867.151.130,90
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mamuju	1	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	150.000.000,00
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju	3	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	150.000.000,00



4	01	01	1	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju	1	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	250.000.000,00
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju	2	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	200.000.000,00
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mamuju	1	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	150.000.000,00
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Mamuju	1	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	200.000.000,00
4	01	01	1	06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	75	437.593.096,43	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75	467.151.130,90
4	01	01	1	06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	1	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	150.000.000,00
4	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	1	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	150.000.000,00



4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	60.000.000,00
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,00
4	01	01	1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju	2	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	10.000.000,00



4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	100.000.000,00
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	1	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	100.000.000,00
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	Mamuju	100	245.998.767,22	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	251.276.987,66
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	11	60.998.767,22	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11	66.276.987,66
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	13	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	60.000.000,00
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mamuju	5	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	25.000.000,00
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mamuju	10	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	50.000.000,00



4	01	01	1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mamuju	5	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5	25.000.000,00
4	01	01	1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju	6	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6	25.000.000,00
04	01	05				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Mamuju	100	1.007.407.757,73	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	825.949.265,77
04	01	05	1	01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Mamuju	100	597.407.757,73	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	500.949.265,77
04	01	05	1	01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Mamuju	40	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40	105.000.000,00
04	01	05	1	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Mamuju	520	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	525	100.000.000,00
04	01	05	1	01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Mamuju	600	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600	95.000.000,00



04	01	05	1	01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Mamaju	141	252.407.757,73	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	144	200.949.265,77
04	01	05	1	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Mamaju	100	410.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	325.000.000,00
04	01	05	1	02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Mamaju	3	305.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	230.000.000,00
04	01	05	1	02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Mamaju	2	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	95.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01	SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamaju	62	2.767.990.137,76	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65	2.810.215.901,29



							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	65			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75	
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	95			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95	
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	22	132.108.620,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22	132.108.620,00
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	22			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22	
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	9,80			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9,80	
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	7,10			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,50	



4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	2	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	18.872.660,00
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Mamuju	1	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.872.660,00
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Mamuju	1	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.872.660,00
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Mamuju	1	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.872.660,00
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	1	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.872.660,00
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Mamuju	2	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	18.872.660,00



4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	4	18.872.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	18.872.660,00
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	95	52.843.448,35	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95	52.843.448,35
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	1	6.290.886,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	6.290.886,67
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	1	6.290.886,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	6.290.886,67
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	1	6.290.886,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	6.290.886,67
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	1	6.290.886,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	6.290.886,67



4	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mamuju	1	6.290.886,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	6.290.886,67
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Mamuju	3	21.389.015,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	21.389.015,00
4	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	1	6.290.886,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	6.290.886,67
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100	72.999.383,60	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	95.110.671,76
4	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	1	18.249.845,90	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	28.777.667,94
4	01	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	1	18.249.845,90	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	28.777.667,94
4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	1	18.249.845,90	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.777.667,94



4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	1	18.249.845,90	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.777.667,94
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100	276.799.013,76	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	281.021.590,16
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	1	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	35.127.698,77
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju	50	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50	35.127.698,77
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	1	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	35.127.698,77
4	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	1	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	35.127.698,77
4	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	1	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	35.127.698,77



4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju	2	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	35.127.698,77
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Mamuju	3	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	35.127.698,77
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	3	34.599.876,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	35.127.698,77
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100	1.775.079.796,94	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	1.804.637.831,41
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mamuju	1	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	10.000.000,00
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mamuju	1	290.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	290.000.000,00
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mamuju	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-



4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju	1	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	162.513.299,49
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	2	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	162.513.299,49
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mamuju	1	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	162.513.299,49
4	01	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Mamuju	1	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	162.513.299,49
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30	529.558.034,47
4	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	1	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	162.513.299,49
4	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	1	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	162.513.299,49



4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100	22.647.192,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	25.814.124,27
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju	1	3.774.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	6.941.464,27
4	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mamuju	1	3.774.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.774.532,00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju	1	3.774.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.774.532,00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mamuju	1	3.774.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.774.532,00
4	01	01	1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju	1	3.774.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.774.532,00
4	01	01	1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju	1	3.774.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.774.532,00



4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	162.513.299,49
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	1	162.513.299,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	162.513.299,49
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mamuju	100	272.999.383,62	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	256.166.315,90
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	12	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	100.000.000,00
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	6	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	83.166.932,28
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mamuju	4	21.499.691,81	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	21.499.691,81
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Mamuju	4	21.499.691,81	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	21.499.691,81



4	01	01	1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju	4	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	15.000.000,00
4	01	01	1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju	4	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	15.000.000,00
4	01	06				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Semua Kabupaten/Kot a	90	604.444.654,64	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90	471.971.009,01
4	01	06	1	01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Semua Kabupaten/Kot a	90	204.444.654,64	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90	131.971.009,01
4	01	06	1	01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kabupaten/Kot a	12	104.444.654,64	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	71.971.009,01
4	01	06	1	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kabupaten/Kot a	6	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6	60.000.000,00
4	01	06	1	02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	Semua Kabupaten/Kot a	100	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	140.000.000,00



4	01	06	1	02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kot a	10	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10	50.000.000,00
4	01	06	1	02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kot a	10	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10	50.000.000,00
4	01	06	1	02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kabupaten/Kot a	12	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	40.000.000,00
4	01	06	1	03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kot a	100	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	200.000.000,00
4	01	06	1	03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kabupaten/Kot a	8	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14	40.000.000,00
4	01	06	1	03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	Semua Kabupaten/Kot a	12	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14	40.000.000,00



4	01	06	1	03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Semua Kabupaten/Kota	12	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	40.000.000,00
4	01	06	1	03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kabupaten/Kota	10	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	40.000.000,00
4	01	06	1	03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Semua Kabupaten/Kota	12	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	40.000.000,00
4	01	08				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota	100	700.185.430,41	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	550.632.842,84
4	01	08	1	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota	100	400.185.430,41	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	350.632.842,84
4	01	08	1	01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kabupaten/Kota	12	130.185.430,41	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	150.632.842,84
4	01	08	1	01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kabupaten/Kota	12	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	100.000.000,00



4	01	08	1	01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kabupaten/Kot a	13	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13	100.000.000,00
4	01	08	1	02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kot a	100	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	200.000.000,00
4	01	08	1	02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	Semua Kabupaten/Kot a	13	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13	70.000.000,00
4	01	08	1	02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	Semua Kabupaten/Kot a	13	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13	60.000.000,00
4	01	08	1	02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kot a	12	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	70.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	SEKRETARIAT DAERAH							



4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	55	2.767.990.137,75	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	60	2.810.215.901,29
							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100	
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	60		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	70	
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	94,50		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	96,37	
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	22	375.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	22,50	440.000.000,00
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	22		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	22,50	
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	9,50		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	9,50	



							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	6,50		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	2	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	80.000.000,00
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	1	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000,00
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	1	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000,00
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mamuju	1	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000,00
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	1	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000,00
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	2	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	60.000.000,00



4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	4	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	60.000.000,00
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	96,00	127.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97,00	135.000.000,00
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	1	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	55.000.000,00
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	2	77.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	80.000.000,00
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	380.000.000,00
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju	80	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80	100.000.000,00



4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju	20	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20	280.000.000,00
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100	650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	750.000.000,00
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju	30	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30	200.000.000,00
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju	10	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10	50.000.000,00
4	01	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Mamuju	40	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40	200.000.000,00
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	40	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40	300.000.000,00
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100	715.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	550.000.000,00



4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Mamuju	4	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	100.000.000,00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju	20	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20	200.000.000,00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mamuju	15	190.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15	250.000.000,00
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100	50.990.137,75	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	55.215.901,29
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	4	50.990.137,75	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	55.215.901,29
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	100	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	500.000.000,00
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	3	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	250.000.000,00



4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	9	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11	250.000.000,00
04	01	07				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	73,03	523.785.141,74	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75,95	332.913.069,68
04	01	07	1	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	Mamuju	100	174.595.047,74	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	110.971.023,68
04	01	07	1	01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	2	58.198.349,74	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	36.990.341,68
04	01	07	1	01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	4	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	36.990.341,00
04	01	07	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	4	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	36.990.341,00
04	01	07	1	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mamuju	100	174.595.047,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	110.971.023,00



04	01	07	1	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Mamuju	4	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	36.990.341,00
04	01	07	1	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	4	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	36.990.341,00
04	01	07	1	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	4	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	36.990.341,00
04	01	07	1	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Mamuju	100	174.595.047,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	110.971.023,00
04	01	07	1	03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	30	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30	36.990.341,00
04	01	07	1	03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	3	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	36.990.341,00
04	01	07	1	03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	3	58.198.349,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	36.990.341,00



		Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	KebutuhanDana/Pagu Indikatif
		(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1				Unsur Pendukung Usuran Pemerintahan								
		1	01			Sekretariat Daerah								
		1	01	01		Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi		86	72.659.741,00	DAU	-	89	73.768.175,60
							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi		100%	522.797.781,00	DAU	-	100%	532.298.577,79
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi		60	2.099.872.874,43	DAU	-	75	2.130.380.984,90
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi		97	72.659.741,33	DAU	-	97	73.768.163,00
		1	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	28	10.379.963,00	DAU	-	28	10.538.321,60
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi		22	41.519.852,00	DAU	-	24	42.153.236,00
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi		14,5	10.379.963,00	DAU	-	14,7	10.538.309,00
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi		14	10.379.963,00	DAU	-	18	10.538.309,00
		1	01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	97	31.139.889,33	DAU	-	97	31.614.927,00
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Organisas		100	41.519.852,00	DAU	-	100	42.153.236,00



		1	01	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	100%	100.000.000,00	DAU	-	100%	100.000.000,00
		1	01	01	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	100%	276.799.013,78	DAU	-	100%	281.021.590,13
		1	01	01	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	100%	1.637.593.096,43	DAU	-	100	1.667.151.130,90
		1	01	01	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	100%	62.279.778,00	DAU	-	100%	63.229.854,00
		1	01	01	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	100%	300.000.000,00	DAU	-	100%	300.000.000,00
		1	01	01	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	Prov. Sulbar	100%	245.998.767,22	DAU	-	100%	251.276.987,66
		1	01	02		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+		33,00%	394.298.152,20	DAU	-	33,33%	504.564.622,80
							Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP		100%	777.163.587,00	DAU	-	100%	960.941.038,00
		1	01	02	01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	Prov. Sulbar	80%	116.432.717,40	DAU	-	85%	153.188.207,60
							Indeks Kematangan Organisasi		28.1-37	277.865.434,80	DAU	-	37,1-46	351.376.415,20



		1	01	02	02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	Prov. Sulbar	50%	307.865.434,80	DAU	-	65%	381.376.415,20
							Nilai SAKIP Pemprov.		70 Poin	469.298.152,20	DAU	-	74 Poin	579.564.622,80

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Umum

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	67,40	596.710.324,00	DAU		73,50	596.710.324,00
							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	8.391.420.676,00	DAU		100	8.496.420.676,00
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	60	19.325.781.884,00	DAU		65	19.856.543.395,00
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	97,00	30.524.559.133,61	DAU		97,00	31.553.954.898,00
4	01	01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	25	257.386.556,00	DAU		25,5	257.386.556,00
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	21	124.965.652,00	DAU		21,5	124.965.652,00



						Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	12,5	76.421.012,00	DAU		12,7	76.421.012,00	
						Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	15	137.937.104,00	DAU		20	137.937.104,00	
4	0 1	01	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	4	257.386.556,00	DAU		4	257.386.556,00
4	0 1	01	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	35.619.650,00	DAU		1	35.619.650,00
4	0 1	01	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	50.286.506,00	DAU		1	50.286.506,00
4	0 1	01	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	16.508.132,00	DAU		1	16.508.132,00
4	0 1	01	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	22.551.364,00	DAU		1	22.551.364,00
4	0 1	01	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	76.421.012,00	DAU		1	76.421.012,00



4	01	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	6	137.937.104,00	DAU		6	137.937.104,00
4	01	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	29.836.041.363,61	DAU		100	30.803.249.636,00
						Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	310.937.460,00	DAU		100	373.124.952,00
4	01	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	300	28.195.099.763,61	DAU		305	28.834.119.716,00
4	01	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	161.550.000,00	DAU		100	193.860.000,00
4	01	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	2450	1.152.969.250,00	DAU		2500	1.383.563.100,00
4	01	02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	326.422.350,00	DAU		1	391.706.820,00
4	01	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	2	57.790.200,00	DAU		2	69.348.240,00
4	01	02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	5	159.285.360,00	DAU		5	191.142.432,00



4	01	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	16	93.861.900,00	DAU		16	112.634.280,00
4	01	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	6.703.807.557,00	DAU		100	7.154.569.068,00
4	01	03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	30	368.963.187,00	DAU		30	402.755.824,00
4	01	03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	4	2.188.213.550,00	DAU		4	2.325.856.260,00
4	01	03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	4	301.201.690,00	DAU		4	311.442.028,00
4	01	03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	6	391.981.970,00	DAU		6	420.378.364,00
4	01	03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	72	120.098.050,00	DAU		72	144.117.660,00
4	01	03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	2	317.391.690,00	DAU		2	330.870.028,00



4	0 1	01	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	40	3.015.957.420,00	DAU		50	3.219.148.904,00
4	0 1	01	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	377.580.310,00	DAU		100	377.580.310,00
4	0 1	01	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	377.580.310,00	DAU		1	377.580.310,00
4	0 1	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	720.629.116,00	DAU		100	825.629.116,00
4	0 1	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	424	72.767.800,00	DAU		435	82.767.800,00
4	0 1	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	124.708.000,00	DAU		1	164.708.000,00
4	0 1	01	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	27	130.328.000,00	DAU		27	150.328.000,00
4	0 1	01	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	75	82.826.376,00	DAU		80	84.826.376,00
4	0 1	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	10	97.259.000,00	DAU		10	100.259.000,00



4	01	05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	30	212.739.940,00	DAU		32	242.739.940,00
4	01	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	6.562.524.183,00	DAU		100	6.562.524.183,00
4	01	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	25	692.494.120,00	DAU		25	692.494.120,00
4	01	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	15	419.961.315,00	DAU		15	419.961.315,00
4	01	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	2	4.157.492.937,00	DAU		2	4.157.492.937,00
4	01	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	17	152.464.850,00	DAU		20	152.464.850,00
4	01	06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	12	455.599.860,00	DAU		12	455.599.860,00
4	01	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	12	633.840.750,00	DAU		12	633.840.750,00
4	01	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	50.670.351,00	DAU		1	50.670.351,00



4	01	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	2.139.503.000,00	DAU		100	2.219.503.000,00
4	01	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	2	35.503.000,00	DAU		2	35.503.000,00
4	01	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	0	-	DAU		4	30.000.000,00
4	01	07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	0	-	DAU		2	50.000.000,00
4	01	07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	30	2.104.000.000,00	DAU		30	2.104.000.000,00
4	01	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	3.919.947.144,00	DAU		100	3.919.947.144,00
4	01	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	12	265.605.004,00	DAU		12	265.605.004,00
4	01	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	4	2.054.322.140,00	DAU		4	2.054.322.140,00
4	01	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	1.600.020.000,00	DAU		1	1.600.020.000,00



4	01	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	7.670.791.560,00	DAU		100	7.670.791.560,00
4	01	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	20	1.398.529.980,00	DAU		20	1.398.529.980,00
4	01	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	150	2.091.423.880,00	DAU		150	2.091.423.880,00
4	01	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	70	946.537.700,00	DAU		70	946.537.700,00
4	01	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	12	3.234.300.000,00	DAU		12	3.234.300.000,00
					PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	20.596.247.663,00	DAU		100	22.096.247.663,00
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	1.265.143.037,00	DAU		100	1.265.143.037,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	239.619.917,00	DAU		2	239.619.917,00
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	4	25.523.120,00	DAU		2	25.523.120,00



						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1	1.000.000.000,00	DAU		2	1.000.000.000,00
						Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	10.653.577.292,00	DAU		100	12.153.577.292,00
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	5	4.254.670.340,00	DAU		5	4.254.670.340,00
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	0	-	DAU		5	1.500.000.000,00
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	8	6.398.906.952,00	DAU		8	6.398.906.952,00
						Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	7.091.034.920,00	DAU		100	7.091.034.920,00
						Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	12	183.007.000,00	DAU		12	183.007.000,00
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1500	6.491.463.560,00	DAU		1500	6.491.463.560,00
						Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	2500	416.564.360,00	DAU		2500	416.564.360,00
						Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100	1.586.492.414,00	DAU		100	1.586.492.414,00



						Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1800	116.214.774,00	DAU		1800	116.214.774,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1200	523.137.160,00	DAU		1200	523.137.160,00
						Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1800	947.140.480,00	DAU		1800	947.140.480,00



BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan secara optimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menyusun RKA dan DPA Tahun 2023 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

5.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini, memuat tujuan dan sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat,



Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP. : 19640015 199303 1 001

